

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER:
AGENDA SETTING DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
STUDI KASUS PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA TERNAK SAPI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh : Jumain
NPM: 2526061015

Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.



PRODI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

AGENDA SETTING DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA STUDI KASUS PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA TERNAK SAPI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam kajian kebijakan publik, setiap isu publik yang muncul dan memperoleh perhatian pemerintah tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang panjang dan kompleks. Proses tersebut dikenal sebagai agenda setting, yaitu tahapan di mana suatu masalah memperoleh perhatian publik dan diangkat menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Salah satu contoh isu yang dapat menjelaskan dinamika proses agenda setting adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia. Namun dalam konteks kajian ini, PMK tidak dipahami sebagai masalah teknis di bidang kesehatan hewan, melainkan sebagai fenomena kebijakan publik yang menggambarkan bagaimana pemerintah menanggapi tekanan sosial, politik, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut (Tremblay et al., 2016) dalam teori *Public Policy Making*, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh seorang atau sekelompok aktor pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Tremblay membedakan kebijakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan substantif (*substantive policy*) dan kebijakan prosedural (*procedural policy*). Kebijakan substantif menjawab pertanyaan *apa yang harus dilakukan pemerintah*, sedangkan kebijakan prosedural menjelaskan *bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan siapa yang berperan di dalamnya*. Dalam konteks isu seperti PMK, kebijakan substantif berkaitan dengan langkah-langkah teknis seperti vaksinasi, pengendalian penyakit, dan distribusi ternak; sementara kebijakan prosedural terkait dengan koordinasi antar lembaga, mekanisme pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perspektif Tremblay menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dan politik di antara para aktor yang terlibat. Dalam konteks inilah, isu PMK dapat dilihat sebagai bentuk ketidakmampuan sistem kebijakan dalam mengantisipasi risiko dan beradaptasi terhadap perubahan global yang cepat. Pandangan tersebut selaras dengan teori Risk Society yang dikemukakan oleh Ulrich Beck, dan dijelaskan kembali oleh (Martina Eka Saputri et al., 2023)

Dalam masyarakat modern, risiko tidak lagi bersifat lokal, tetapi bersifat global dan sistemik termasuk risiko dalam sektor pangan dan peternakan. Risiko penyebaran penyakit seperti PMK tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan hewan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, sosial, bahkan politik. Oleh karena itu, kebijakan publik di era modern harus berorientasi pada pengelolaan risiko (*risk governance*), bukan hanya pada penanganan dampak yang sudah terjadi. (PUBLIK, n.d.) Dalam konteks *teori Beck*, kebijakan yang responsif terhadap risiko menuntut adanya *reflexivity* dari pemerintah kemampuan untuk belajar dari krisis sebelumnya dan mengantisipasi potensi risiko di masa depan. PMK dalam hal ini menjadi contoh bagaimana kebijakan publik harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan global yang tidak pasti, terutama dalam era

globalisasi yang menyebabkan pergerakan komoditas dan hewan ternak lintas batas semakin cepat. Selanjutnya, (Arafat, 2023) melalui pendekatan *Multiple Streams Framework (MSF)* yang diadaptasi dari John W. Kingdon, memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana isu publik seperti PMK dapat naik ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Kingdon menjelaskan bahwa proses agenda setting terdiri dari tiga aliran utama: *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. *Problem stream* berkaitan dengan bagaimana suatu kondisi diidentifikasi sebagai masalah yang perlu ditangani; *policy stream* mencakup berbagai alternatif solusi yang diajukan oleh para ahli dan birokrat; sementara *political stream* berkaitan dengan dinamika kekuasaan, opini publik, dan dukungan politik yang ada pada saat tertentu. Ketika ketiga arus tersebut bertemu dalam satu waktu yang tepat, maka terbuka sebuah policy window, yaitu peluang bagi pemerintah untuk menetapkan isu tersebut sebagai prioritas kebijakan.

Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, model ini menjelaskan mengapa isu-isu tertentu termasuk dalam sektor kesehatan hewan seperti PMK — sering kali baru mendapatkan perhatian serius ketika terjadi tekanan sosial yang kuat. MSF menggambarkan bahwa kebijakan publik di Indonesia cenderung reaktif terhadap krisis (crisis-driven policy), bukan proaktif berdasarkan perencanaan jangka panjang. Dengan kata lain, kebijakan baru sering lahir ketika tiga arus kebijakan bertemu akibat dorongan eksternal seperti tekanan media, desakan masyarakat, atau ancaman ekonomi. Selain itu (Agustina, 2019) melalui *teory Implementation Framework* menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, tetapi juga oleh seberapa efektif koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks seperti Indonesia, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antaraktor, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan adaptasi di lapangan.

Dalam isu seperti PMK, proses kebijakan publik menunjukkan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat peternak agar kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif. Kerangka implementasi ini menegaskan bahwa proses kebijakan bukan hanya perumusan ide di tingkat elite, tetapi juga melibatkan praktik di lapangan yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan itu sendiri. Dalam dimensi tata kelola modern, (Arafat, 2023) juga menggarisbawahi pentingnya *Governance Network Theory*, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa kebijakan publik pada era globalisasi tidak dapat dikelola hanya melalui struktur hierarkis pemerintahan, tetapi harus melibatkan jaringan kolaboratif (policy networks) antara berbagai aktor. Dalam jaringan ini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, bukan satu-satunya pengendali kebijakan. Isu seperti PMK membutuhkan kolaborasi lintas sektor — antara lembaga pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak lagi bergantung semata pada kekuasaan formal, tetapi pada kemampuan koordinasi dan kemitraan antaraktor dalam jaringan kebijakan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai PMK di Indonesia dalam konteks ini tidak difokuskan pada kronologi atau data empiris, melainkan pada pemahaman konseptual tentang bagaimana isu kebijakan muncul, diformulasikan, dan dikelola dalam sistem kebijakan publik yang bersifat responsif, kolaboratif, dan adaptif. PMK hanyalah ilustrasi teoretis dari mekanisme agenda setting dalam kebijakan publik Indonesia, yang menggambarkan

hubungan erat antara tekanan sosial, legitimasi politik, serta proses kelembagaan dalam penentuan prioritas kebijakan.

1.2 Dampak Sosial Ekonomi dan Tantangan Kebijakan PMK

Wabah PMK memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat peternak dan perekonomian nasional. Menurut (Firman et al., 2022), kerugian ekonomi akibat wabah PMK sangatlah tinggi yang mencakup penurunan produksi susu, kematian ternak, serta gangguan logistik. (Putri & Firman, 2024) menambahkan bahwa pendapatan peternak sapi perah di wilayah Bogor menurun akibat menurunnya produktivitas ternak pasca wabah. Dampak ini juga menimbulkan tekanan psikologis dan sosial, terutama bagi peternak kecil.

Dalam konteks teori kebijakan publik, *Rational Choice Theory* dari (Tremblay et al., 2016) menjelaskan bahwa pembuat kebijakan akan memilih alternatif yang paling efisien berdasarkan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi massal dan pembatasan mobilitas hewan merupakan bentuk pilihan rasional untuk menekan laju penyebaran penyakit.

Teori *Incrementalism* (Dewi, 2022) menggambarkan bahwa kebijakan publik biasanya berubah secara bertahap melalui langkah-langkah kecil. Penanganan PMK menunjukkan pola tersebut, di mana kebijakan dimulai dari pembatasan sementara hingga berkembang menjadi strategi vaksinasi nasional. Selain itu, *Adaptive Policy Theory* (Agustina, 2019) menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan publik agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang berubah-ubah.

Dalam kondisi krisis, *Crisis Policy Theory* (Arafat, 2023) menjelaskan bahwa kecepatan dan efektivitas lebih penting dibandingkan kesempurnaan perencanaan. Pemerintah harus segera bertindak berdasarkan data yang tersedia, meskipun dengan risiko ketidakpastian tinggi. Akhirnya, *Welfare Policy Theory* dari (Dewi, 2022) menegaskan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan memberikan kompensasi dan dukungan ekonomi kepada masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, teori-teori tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan PMK merupakan hasil dari kombinasi antara pendekatan rasional, adaptif, dan respons krisis. Ketiganya menciptakan sinergi yang memungkinkan pemerintah merespons situasi darurat dengan tetap menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional.

1.3 Tinjauan Teoritis Kebijakan Publik terhadap Penanganan PMK

Dalam kajian kebijakan publik, penanganan terhadap isu-isu strategis seperti *Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)* pada hewan ternak dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoretis yang menggambarkan bagaimana proses kebijakan publik berlangsung dari tahap identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi. Kajian teoritis ini penting karena memberikan pemahaman konseptual tentang bagaimana sistem kebijakan bekerja dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks. Oleh karena itu, tinjauan terhadap teori-teori kebijakan publik berikut ini tidak dimaksudkan untuk membahas kasus empiris PMK secara langsung,

tetapi untuk menjelaskan bagaimana isu-isu kebijakan seperti itu dikelola, diformulasikan, dan dievaluasi dalam kerangka kebijakan publik modern.

Menurut (Meutia, 2017) proses kebijakan publik terdiri atas empat tahap utama: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Tahapan ini menggambarkan suatu siklus rasional dalam kebijakan publik di mana setiap keputusan harus didasarkan pada identifikasi masalah yang akurat, perumusan kebijakan yang berbasis bukti, implementasi yang efektif, serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, isu seperti PMK dapat dijadikan ilustrasi bagaimana kebijakan publik berfungsi secara sistematis — mulai dari pengenalan masalah oleh masyarakat dan pemerintah, hingga ke tahap evaluasi untuk menilai efektivitas langkah-langkah kebijakan yang telah diambil. Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara pengetahuan, nilai, dan kekuasaan, di mana pembuat kebijakan berupaya menyeimbangkan kepentingan publik dan realitas administratif.

Kerangka Meutia tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan *Teory Multiple Streams Framework (MSF)* yang dikemukakan oleh Kingdon (Arafat, 2023). MSF menjelaskan bahwa kebijakan publik lahir ketika tiga arus kebijakan (*streams*) bertemu: *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Dalam konteks isu kesehatan hewan, *problem stream* muncul ketika masyarakat dan pemerintah mengidentifikasi adanya persoalan yang mengancam kepentingan publik; *policy stream* mencakup alternatif solusi yang ditawarkan oleh para ahli dan birokrat; sedangkan *political stream* berhubungan dengan dukungan politik, opini publik, serta legitimasi dari para aktor politik. Pertemuan ketiga arus tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai *policy window*, yaitu momen di mana pembuat kebijakan memiliki peluang untuk mendorong isu tertentu masuk ke dalam agenda kebijakan nasional. Model ini menggambarkan bahwa kebijakan publik di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan sektor peternakan dan pangan, sering kali lahir sebagai respons terhadap tekanan sosial dan politik yang kuat bukan semata hasil perencanaan teknokratis.

Sementara itu, dalam tahap implementasi, *teori Public Management (PUBLIK, n.d.)* menekankan pentingnya efektivitas manajemen publik dalam menjalankan kebijakan yang telah diformulasikan. Menurut Tremblay, implementasi yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan dengan benar, tetapi juga pada bagaimana birokrasi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga berjalan secara harmonis. Pemerintahan yang efektif dalam konteks kebijakan publik adalah pemerintahan yang mampu mengintegrasikan manajemen administratif dengan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka ini, penanganan isu seperti PMK menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kepemimpinan publik yang adaptif untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Selanjutnya, *teori Policy Network* yang dijelaskan oleh (Arafat, 2023) memberikan pemahaman tambahan bahwa kebijakan publik tidak lagi bersifat linear dan hierarkis, melainkan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam suatu jaringan kebijakan (*policy network*). Jaringan ini terdiri dari aktor pemerintah, akademisi, organisasi profesi, media, serta kelompok kepentingan lainnya yang berperan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, *Policy Network Theory* menyoroti pentingnya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam mengelola isu-isu publik. Kebijakan yang efektif bukan lagi hasil dari keputusan tunggal

pemerintah, melainkan hasil dari koordinasi, dialog, dan pembelajaran bersama antaraktor dalam jaringan tersebut.

Selain itu, teori *Policy Learning* yang juga dikemukakan oleh (Arafat, 2023) menegaskan bahwa proses kebijakan publik bersifat dinamis dan berkelanjutan karena pembuat kebijakan selalu belajar dari pengalaman masa lalu. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang sempurna di awal, melainkan kebijakan yang terus disempurnakan melalui proses pembelajaran institusional dan refleksi kebijakan sebelumnya. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dapat dilakukan dengan mengacu pada pengalaman keberhasilan maupun kegagalan dalam menghadapi krisis serupa di masa lalu, agar kebijakan yang baru lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Teori ini relevan karena menekankan bahwa proses kebijakan publik yang baik adalah proses yang mampu menyerap pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan.

Di sisi lain, (Agustina, 2019) melalui *Implementation Framework* memperluas pandangan ini dengan menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik (implementasi) adalah tahap yang paling menentukan dalam siklus kebijakan. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keputusan politik di tingkat pusat, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi di tingkat pelaksana. Faktor-faktor seperti komunikasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lingkungan sosial menjadi elemen penting yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks isu-isu publik seperti PMK, teori ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang konsisten di lapangan.

Teori terakhir yang relevan adalah *Policy Feedback Theory* (Dewi, 2022) yang menyoroti bagaimana hasil dari suatu kebijakan akan memberikan umpan balik terhadap sistem kebijakan berikutnya. Menurut teori ini, hasil dari kebijakan sebelumnya (baik keberhasilan maupun kegagalannya) akan memengaruhi cara pembuat kebijakan merumuskan kebijakan baru di masa depan. Dengan demikian, kebijakan publik bersifat siklikal — hasil masa lalu menjadi pelajaran untuk kebijakan masa depan. Dalam sistem kebijakan publik yang ideal, mekanisme umpan balik ini mendorong terjadinya pembelajaran institusional yang berkelanjutan, sehingga kebijakan semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan berbagai teori di atas, dapat dipahami bahwa penanganan isu kebijakan publik seperti PMK di Indonesia merupakan proses yang tidak tunggal, melainkan hasil interaksi dari berbagai tahapan dan aktor dalam sistem kebijakan. Meutia (2017) menekankan siklus kebijakan yang sistematis; Kingdon (dalam Arafat, 2023) menjelaskan peluang kebijakan melalui pertemuan tiga arus; Tremblay et al. (2016) menyoroti pentingnya manajemen publik yang efektif; Arafat (2023) melalui *Policy Network* dan *Policy Learning* menekankan kolaborasi serta pembelajaran institusional; sementara Agustina (2019) dan Dewi (2022) menegaskan pentingnya implementasi dan mekanisme umpan balik kebijakan.

Keseluruhan teori tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan publik di Indonesia bersifat adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran, di mana setiap kebijakan merupakan hasil kompromi antara rasionalitas teknokratik, dinamika politik, serta kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka konseptual ini, PMK hanya digunakan sebagai ilustrasi untuk

memahami bagaimana sistem kebijakan bekerja secara holistik dari tahap perumusan hingga evaluasi dalam merespons isu publik yang berdampak luas terhadap masyarakat.

BAB II. FORMULASI KEBIJAKAN DAN PROSES AGENDA SETTING

2.1 Model dan Teori Agenda Setting dalam Kebijakan Publik

Proses *agenda setting* dalam kebijakan publik merupakan tahap krusial di mana suatu isu publik memperoleh perhatian dan diangkat menjadi kebijakan resmi. Menurut (Arafat, 2023) melalui *Multiple Streams Framework (MSF)*, suatu isu dapat masuk ke dalam agenda pemerintah ketika tiga arus kebijakan bertemu dalam satu jendela kesempatan (*policy window*): *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Dalam konteks PMK, *problem stream* muncul dari penyebaran wabah, *policy stream* berupa usulan kebijakan dan pembatasan mobilitas, dan *political stream* berupa tekanan publik dan perhatian media nasional (Rohma et al., 2022)

Selanjutnya, teori *Advocacy Coalition Framework* dari (Agustina, 2019) menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam kasus PMK, dalam konteks teoretis, implementasi kebijakan publik sering melibatkan koordinasi lintas lembaga (Bulu, 2023) Model ini menegaskan bahwa kebijakan tidak lahir dari satu aktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi koalisi yang memiliki nilai dan kepentingan sama.

Teori *Incrementalism* dari (Dewi, 2022) juga tampak jelas dalam proses kebijakan PMK. Pemerintah Indonesia tidak langsung mengubah sistem besar, melainkan melakukan perubahan secara bertahap (Novericko Ginger Budiono.Pdf, n.d.) Pendekatan ini realistis untuk menghadapi ketidakpastian di lapangan.

Selain itu, teori *Punctuated Equilibrium* dari (Tremblay et al., 2016) menjelaskan bagaimana kebijakan publik sering berada dalam periode stabil hingga terjadi krisis besar yang mengguncang sistem. Wabah PMK menjadi momen yang memicu perubahan mendasar pada kebijakan peternakan nasional yang sebelumnya cenderung stagnan. Dalam kasus ini, perhatian media dan dampak ekonomi besar memaksa pemerintah untuk meninjau ulang regulasi veteriner (Fathurrohman & Dewi, 2023)

Teori kelima yang relevan adalah *Problem Definition Theory* oleh (Arafat, 2023) yang menegaskan bahwa cara suatu masalah dikonstruksi di ruang publik akan menentukan prioritas kebijakan. Framing PMK sebagai “krisis nasional” mendorong munculnya respon cepat pemerintah, memperkuat dukungan politik, serta meningkatkan legitimasi tindakan darurat.

Dengan demikian, lima teori ini MSF, ACF, Incrementalism, PET, dan Problem Definition yang menunjukkan bahwa kebijakan PMK terbentuk melalui kombinasi antara tekanan sosial, interaksi antaraktor, serta respon cepat terhadap krisis nasional.

2.2 Implementasi dan Aktor Agenda Setting pada Kasus PMK di Indonesia

Tahap implementasi merupakan momen penting di mana kebijakan diuji di lapangan. Menurut (Arafat, 2023) melalui *Policy Network Theory*, implementasi kebijakan sangat bergantung pada hubungan dan komunikasi antara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan.

Teori *Collaborative Governance* dari (Arafat, 2023) memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya kepercayaan, dialog, dan konsensus antaraktor dalam menghadapi isu kompleks. Dalam konteks PMK, kolaborasi di lapangan dilakukan melalui program vaksinasi terpadu, pelaporan kasus digital, serta edukasi langsung kepada Masyarakat. (Putri & Firman, 2024)

Pendekatan *Top-down and Bottom-up Implementation* dari (Arafat, 2023) juga tampak diterapkan. Pemerintah pusat merumuskan kebijakan umum (top-down), sementara pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kapasitas daerah (bottom-up). Pendekatan ini meminimalkan hambatan komunikasi dan mempercepat respon di daerah terdampak.

Adaptive Policy Theory dari (Agustina, 2019) menunjukkan bahwa pemerintah harus fleksibel terhadap perubahan kondisi. Pemerintah menyesuaikan jumlah dosis vaksin dan memperluas area vaksinasi berdasarkan tingkat infeksi yang dinamis. Sementara itu, *Crisis Policy Theory* dari (Agustina, 2019) menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, kecepatan pengambilan keputusan lebih diutamakan daripada analisis panjang. Dalam kasus PMK, pembentukan Satgas Nasional dan distribusi cepat vaksin merupakan refleksi nyata dari kebijakan berbasis krisis yang efektif.

Kelima teori ini menggambarkan implementasi PMK sebagai proses kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap krisis. Interaksi antaraktor menjadi inti keberhasilan kebijakan dalam mengendalikan penyebaran penyakit di tingkat nasional.

2.3 Analisis Formulasi, Kinerja, dan Evaluasi Kebijakan PMK

Menurut (Meutia, 2017) dalam *Policy Learning Theory*, pemerintah perlu belajar dari kebijakan masa lalu untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan. Pengalaman pemberantasan PMK menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan modern berbasis sains, menegaskan bahwa formulasi kebijakan bukanlah proses yang sekali jadi, melainkan hasil dari proses belajar yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan harus mampu belajar dari pengalaman masa lalu baik dari keberhasilan maupun kegagalan kebijakan sebelumnya untuk memperbaiki rancangan kebijakan baru. *Policy Learning* menjelaskan bahwa kebijakan publik bersifat evolutif; efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan aktor kebijakan dalam mengolah informasi dan menerapkan pengetahuan empiris ke dalam rancangan kebijakan yang lebih adaptif.

Selanjutnya, *Evaluation Theory* (PUBLIK, n.d.) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dalam perspektif *Policy Feedback* dari (Dewi, 2022), hasil kebijakan PMK menjadi input bagi kebijakan baru seperti penguatan laboratorium veteriner dan peningkatan pengawasan lalu lintas ternak. Hal ini menunjukkan adanya siklus umpan balik positif yang memperkuat sistem kebijakan.

Akhirnya, *Public Management Theory* (Tremblay et al., 2016) menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang akuntabel dan partisipatif. Penguatan struktur birokrasi, transparansi data, dan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan PMK secara berkelanjutan.

Dengan demikian, proses formulasi dan evaluasi kebijakan PMK menggambarkan integrasi antara efisiensi ekonomi, pembelajaran institusional, dan tata kelola publik yang kolaboratif.

Simpulan Critical Theory dan Pertentangan Teori

Dari berbagai teori yang dianalisis dalam proses kebijakan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu teori tunggal yang mampu menjelaskan seluruh tahapan kebijakan publik secara utuh. Setiap teori memiliki keunggulan dan keterbatasan, namun pendekatan Multiple Streams Framework (Arafat, 2023) dan Advocacy Coalition Framework (Agustina, 2019) dinilai paling relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia.

Teori Multiple Streams Framework menjelaskan bagaimana isu PMK dapat naik ke agenda nasional melalui pertemuan tiga arus kebijakan *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream* yang menciptakan *policy window*. Pendekatan ini menggambarkan dengan baik kondisi birokrasi dan politik di Indonesia yang sering reaktif terhadap krisis dan tekanan publik.

Sementara itu, *Advocacy Coalition Framework* menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antaraktor kebijakan, seperti pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, akademisi, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistik dan membutuhkan sinergi lintas sektor dalam menghadapi krisis nasional seperti PMK.

Selain itu, *Policy Learning Theory* (Meutia, 2017) menjadi pendukung penting karena menunjukkan bahwa proses kebijakan di Indonesia berlangsung secara berkelanjutan melalui mekanisme pembelajaran institusional. Pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman bebas PMK tahun 1986 untuk menyusun kebijakan vaksinasi massal yang lebih efektif pada tahun 2022.

Dengan demikian, kombinasi antara *Multiple Streams Framework*, *Advocacy Coalition Framework*, dan *Policy Learning Theory* merupakan pendekatan yang paling tepat untuk diaplikasikan. Ketiganya mampu menggambarkan sinergi antara tekanan krisis, koordinasi aktor, dan proses pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan, yang menjadi ciri utama proses kebijakan publik di Indonesia.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Iaras. (2019). Kebijakan Publik (Teori dan Kebijakan)
- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik*.
- Bulu, P. M. (2023). REVIEW: EPIDEMIOLOGI, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (Pembelajaran dari Wabah PMK Indonesia 1887-1997). *Partner*, 28(1), 62. <https://doi.org/10.35726/jp.v28i1.6840>
- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 268.
- Fathurrohman, R. A. N., & Dewi, D. S. K. (2023). Dinamika Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Endemi Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Di Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 317–327. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2670>
- Firman, A., Trisman, I., & Puradireja, R. H. (2022). Dampak Ekonomi Akibat Outbreak Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak Sapi Dan Kerbau Di Indonesia. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 1123. <https://doi.org/10.25157/ma.v8i2.7749>
- Martina Eka Saputri, Icha Cahya Kusuma Ningtias, & Nurdiana Holida. (2023). Ketidakpastian Dan Risiko Yang Dialami Masyarakat Di Era Modernisasi. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 131–144. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i2.261>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. *Novericko Ginger Budiono.pdf*. (n.d.).
- PUBLIK. (n.d.).(2022) KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi
- Putri, M. A., & Firman, A. (2024). *Dampak Penyakit Mulut dan Kuku terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah di Wilayah Kerja Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor The Impact of Foot and Mouth Disease on Dairy Cattle Businesses in the Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor Working Area Program Stud.* 10(2), 109–120.
- Rohma, M. R., Zamzami, A., Utami, H. P., Karsyam, H. A., & Widianingrum, D. C. (2022). Kasus penyakit mulut dan kuku di Indonesia: epidemiologi, diagnosis penyakit, angka kejadian, dampak penyakit, dan pengendalian. *Conference of Applied Animal Science Proceeding Series*, 3, 15–22. <https://doi.org/10.25047/animpro.2022.331>
- Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). Kebijakan Publik. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1).http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>